

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan. Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil memiliki peran sentral dalam menciptakan ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa semakin meningkat, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri. Salah satu bentuk konkret dari implementasi kebijakan ini adalah dengan digulirkannya program Dana Desa (DD).

Dana Desa (DD) merupakan program pemerintah yang dianggarkan untuk mempercepat pembangunan desa melalui pembiayaan langsung kepada pemerintah desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat pedesaan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Dana Desa (DD) menjadi sumber pendanaan utama yang memberikan peluang besar bagi desa untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang selama ini sulit dipenuhi karena keterbatasan anggaran daerah. Melalui Dana Desa (DD), desa dapat membangun jalan desa, jembatan, drainase, sarana air bersih, irigasi pertanian, dan fasilitas publik lainnya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, Dana Desa (DD) diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif dari bawah ke atas (bottom-up development).

Dalam pelaksanaannya, penggunaan Dana Desa (DD) tidak selalu berjalan optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa (DD), mulai dari kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, sistem perencanaan dan penganggaran yang kurang partisipatif, lemahnya pengawasan dan evaluasi, hingga potensi penyalahgunaan dana. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak berkelanjutan, atau bahkan menimbulkan persoalan baru seperti konflik sosial, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala mengenai bagaimana Dana Desa (DD) digunakan dan sejauh mana penggunaannya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur desa.

Kecamatan Bandar Kedungmulyo yang terletak di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah yang turut menerima alokasi Dana Desa (DD) sejak awal pelaksanaan program. Kecamatan Bandar Kedungmulyo terdiri dari sebelas desa, yaitu Bandar Kedungmulyo, Gondangmanis, Kayen, Pucangsimo, Brangkal, Barongsawahan, Brodot, Karangdagangan, Banjarsari, Tinggar, dan Mojokambang. Setiap desa memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastrukturnya juga bervariasi. Pemerintah desa di wilayah ini telah mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, pembangunan saluran irigasi, pembangunan jembatan kecil, pembangunan posyandu, serta penyediaan sarana air bersih.

Secara umum pembangunan infrastruktur telah terlaksana di setiap desa, namun minim kajian yang secara spesifik mengukur seberapa besar pengaruh Dana Desa (DD) terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Beberapa indikator yang penting untuk dianalisis meliputi kualitas bangunan infrastruktur, pemeliharaan yang berkelanjutan, dampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,

serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa dana yang besar benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Efektivitas Dana Desa (DD) juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam konteks pembangunan partisipatif, masyarakat desa seharusnya tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan yang aktif terlibat dalam setiap tahapan. Ketika masyarakat turut terlibat dalam musyawarah desa, identifikasi kebutuhan infrastruktur, serta evaluasi hasil pembangunan, maka proyek yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.

Faktor geografis dan sumber daya alam juga turut mempengaruhi kecepatan dan kualitas pembangunan. Desa yang secara geografis lebih dekat dengan pusat kota atau memiliki akses transportasi yang baik, akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan desa yang terpencil atau memiliki kondisi medan yang sulit. Begitu juga dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang potensial akan lebih mudah mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo seluruhnya menerima Dana Desa (DD) setiap tahunnya, namun masih menunjukkan tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Beberapa desa mampu memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas sosial dengan baik, sementara desa lain mengalami keterlambatan, kualitas pembangunan yang rendah, atau bahkan menghadapi permasalahan dalam realisasi program. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampak pengelolaan Dana Desa (DD) dan faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar desa dalam satu wilayah administratif yang sama. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis perbedaan kemajuan pembangunan antar desa, khususnya

yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD). Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan sejauh mana perbedaan itu terjadi, tetapi juga mencari tahu akar penyebabnya, baik dari sisi manajerial, partisipatif, maupun struktural. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif, berbasis pada karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa, guna mewujudkan pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pengaruh penggunaan Dana Desa (DD) terhadap pembangunan infrastruktur di sebelas desa.

Kecamatan Bandar Kedungmulyo di kabupaten Jombang sebagai salah satu penerima Dana Desa dengan jumlah yang relatif besar setiap tahunnya, namun hasil pembangunan infrastruktur yang tercapai tidak sama antar desa. Oleh karena itu penelitian dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan Bandar Kedumulyo kabupaten Jombang menjadi penting dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa pada masa mendatang.

Secara umum yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu 1) Kondisi umum desa di Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil masih banyak menghadapi keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, 2) Kebijakan Pemerintah terkait Dana Desa yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 sebagai dasar penyaluran Dana Desa, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan desa, 3) Alokasi dan pentingnya Dana Desa, dimana setiap desa mendapatkan Dana Desa langsung dari APBN sejak 2015 sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, 4) Permasalahan yang masih dihadapi dikarenakan masih belum meratanya pemanfaatan Dana Desa akibat dari penggunaan yang tidak tepat sasaran,

5) Kebutuhan penelitian akan pentingnya untuk meneliti dampak dari Dana Desa pada Pembangunan infrastruktur.

Secara khusus yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui APBN sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014. Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar guna menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih terdapat tantangan terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang *dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur* agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuan pembangunan desa.

1.2. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini :

1. Apakah Jumlah Dana Desa (JDD) berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo.
2. Apakah Prosentase Infrastruktur (PI) berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo.
3. Apakah Jumlah Kegiatan Fisik (JKF) berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo.
4. Apakah Jumlah Dana Desa (JDD), Prosentase Infrastruktur (PI) , dan Jumlah Kegiatan Fisik (JKF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Dana Desa (JDD) terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo.
2. Untuk menganalisis pengaruh Prosentase Infrastruktur (PI) terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Kegiatan Fisik (JKF) terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo.
4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Dana Desa (JDD), Prosentase Infrastruktur (PI), dan Jumlah Kegiatan Fisik (JKF) secara bersama-sama terhadap Pembangunan Infrastruktur pada sebelas desa di kecamatan Bandar Kedungmulyo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah dan desa dalam merencanakan penggunaan Dana Desa (DD).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bidang pembangunan, khususnya bagi penelitian berikutnya.

Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagi peneliti sejenis.